



Pemprov Pangkas Dana Pengawasan Pilgub

DENPASAR - Rasionalisasi anggaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2018, tak hanya berlaku bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bali. Dana untuk pengawasan yang diajukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali juga dipangkas. Dari Rp 73 miliar, dipangkas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bali menjadi Rp 68 miliar atau turun Rp 5 miliar.

Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Rudia saat dikofirmasi via telepon, Kamis kemarin (28/7) menyatakan, bahwa terkait rasionalisasi itu diakui sudah final. Katanya, dia hasil pertemuan dengan sekretaris daerah provinsi awal atau minggu pertama Juli 2016 lalu. "Dana pengawasan sebesar Rp 63 miliar dari awal pengajuan awal sebesar Rp 73 miliar," ujarnya.

Rudia menilai, pemangkasan dana pengawasan masih dalam ambang batas wajar. Artinya meskipun ada rasionalisasi, namun dengan melihat tahapan dan kebutuhan tahapan

Bawaslu Bali masih menilai proporsional dan mencukupi.

Lebih lanjut, Rudia juga menjelaskan, bahwa terkait dengan pencairan anggaran, sesuai rencana dan hasil pertemuan dengan berbagai pihak, penganggaran pemilu untuk pengawasan Pilgub 2018 dilakukan secara multiyears dengan skema dua kali penganggaran di 2017 dan di 2018. Namun begitu, dengan dekatnya tahapan, serta sebagai antisipasi dan sebagai tujuan agar proses persiapan dan pengawasan bisa berjalan lancar tanpa adanya kendala dalam proses pencairan dengan skema seperti itu, selaku pimpinan Bawaslu Bali, dia mengusulkan agar skema pencairan untuk 2018 bisa diajukan setahun sebelumnya atau pada 2017. "Rancangan usulan itu kami maksudkan sebagai antisipasi tahapan," tandasnya.

Bawaslu Bali juga telah menyiapkan opsi lain dengan skema pencairan dengan persentase. (pra/yor)

Edisi : Sabtu, 30 Juli 2016

Hal : 23